

## DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERBARU(LIST OF NEW LAWS AND REGULATIONS) Maret 2026

Jenis Peraturan / Types of Regulation	Nomor / Number	Judul	Title
<b>PERIODE II BULAN MARET 2026 (SECOND PERIOD OF MARCH 2026)</b>			
RUU		HUKUM PERDATA INTERNASIONAL	<i>Private International Law</i>
RANCANGAN PERPU		PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA EKONOMI DAN PEMULIHAN PEREKONOMIAN NEGARA	<i>Combating Economic Crimes and Economic Recovery of the State</i>
PP	9 Tahun 2026	PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA DAN GAJI KETIGA BELAS KEPADA APARATUR NEGARA, PENSUNAN, PENERIMA PENSUN, DAN PENERIMA TUNJANGAN TAHUN 2026	<i>Provision of Holiday Allowances and Thirteenth Salary to Civil Servants, Retirees, Pension Recipients, and Allowance Recipients in 2026</i>
	5 Tahun 2026	PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 5 TAHUN 1996 TENTANG HAK KEUANGAN/ADMINISTRATIF DUTA BESAR LUAR BIASA DAN BERKUASA PENUH DAN MANTAN DUTA BESAR LUAR BIASA DAN BERKUASA PENUH SERTA JANDA/DUDANYA	<i>Second Amendment to Regulation of the Government Number 5 of 1996 on the Financial/Administrative Rights of Ambassadors Extraordinary and Plenipotentiary and Former Ambassadors Extraordinary and Plenipotentiary, as well as Their Widows/Widowers</i>
RPP		PERATURAN JABATAN PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH	<i>Regulations on the Position of Land Deed Officials</i>
PERPRES	10 Tahun 2026	PEMBUKAAN KONSULAT JENDERAL REPUBLIK INDONESIA DI CHENGDU, REPUBLIK RAKYAT TIONGGOK	<i>Opening of the Consulate General of the Republic of Indonesia in Chengdu, People's Republic of China</i>
PERMEN PEKERJAAN UMUM	5 Tahun 2026	PENERAPAN SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK	<i>Application of the Electronic-Based Government System</i>
	4 Tahun 2026	PENGELOLAAN BARANG MILIK NEGARA DI KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM	<i>Management of State-Owned Assets at the Ministry of Public Works</i>
PERMEN PPN/KEPALA BAPPENAS	2 Tahun 2026	TATA CARA PERENCANAAN DANA ALOKASI KHUSUS	<i>Procedures for Planning Special Allocation Funds</i>
PERMEN PEMUDA DAN OLAHRAGA	4 Tahun 2026	PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA NOMOR 10 TAHUN 2023 TENTANG TATA CARA PEMBERIAN REKOMENDASI ATAS USULAN PEMBERIAN KEWARGANEGARAAN REPUBLIK INDONESIA BAGI OLAHRAGAWAN WARGA NEGARA ASING DAN TENAGA KEOLAHRAGAAN WARGA NEGARA ASING	<i>Amendment to Regulation of the Minister of Youth and Sports Number 10 of 2023 on Procedures for the Issuance of Recommendations on Proposals for the Granting of Indonesian Citizenship to Foreign National Athletes and Foreign National Sports Personnel</i>
PERMEN PERINDUSTRIAN	3 Tahun 2026	TATA CARA PENERBITAN PERTIMBANGAN TEKNIS DALAM RANGKA PEMBERIAN FASILITAS PEMBEBASAN BEA MASUK	<i>Procedures for the Issuance of Technical Considerations for the Granting of Import Duty Exemption Facilities</i>
	2 Tahun 2026	TATA CARA PENYUSUNAN DAN PEMBERIAN PERSETUJUAN RENCANA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DAN RENCANA PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP RINCI BAGI RENCANA USAHA DAN/ATAU KEGIATAN YANG AKAN BERLOKASI DI KAWASAN INDUSTRI	<i>Procedures for the Preparation and Approval of Environmental Management Plans and Detailed Environmental Monitoring Plans for Business Plans and/or Activities to be Located in Industrial Zones</i>
PERMEN PANRB	2 Tahun 2026	JABATAN FUNGSIONAL PENATA KELOLA PEMILIHAN UMUM	<i>Functional Position of Election Administrator</i>
PERMEN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA/BP2MI	2 Tahun 2026	TATA CARA PENEMPATAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA OLEH PELAKSANA PENEMPATAN	<i>Procedures for the Placement of Indonesian Migrant Workers by Placement Agencies</i>
PERMEN LUAR NEGERI	1 Tahun 2026	JABATAN DAN KELAS JABATAN PEGAWAI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN LUAR NEGERI	<i>Positions and Position Grades of Civil Servants within the Ministry of Foreign Affairs</i>
PERMEN KELAUTAN DAN PERIKANAN	6 Tahun 2026	PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN NOMOR 33 TAHUN 2023 TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 26 TAHUN 2023 TENTANG PENGELOLAAN HASIL SEDIMENTASI DI LAUT	<i>Second Amendment to Regulation of the Minister of Marine Affairs and Fisheries Number 33 of 2023 on the Implementing Regulations of Regulation of the Government Number 26 of 2023 on the Management of Marine Sedimentation</i>
	5 Tahun 2026	PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN NOMOR 7 TAHUN 2024 TENTANG PENGELOLAAN LOBSTER (PANULIRUS SPP.), KEPITING (SCYLLA SPP.), DAN RAJUNGAN (PORTUNUS SPP.)	<i>Amendment to Regulation of the Minister of Marine Affairs and Fisheries Number 7 of 2024 on the Management of Lobsters (Panulirus spp.), Crabs (Scylla spp.), and Mud Crabs (Portunus spp.)</i>
PERMEN KOMUNIKASI DAN DIGITAL	9 Tahun 2026	PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 17 TAHUN 2025 TENTANG TATA KELOLA PENYELENGGARAAN SISTEM ELEKTRONIK DALAM PELINDUNGAN ANAK	<i>Implementing Regulation of Regulation of the Government Number 17 of 2025 on the Governance of the Organization of Electronic Systems in Child Protection</i>
PERMEN KEUANGAN	12 Tahun 2026	RINCIAN DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU MENURUT DAERAH PROVINSI/KABUPATEN/KOTA TAHUN ANGGARAN 2026	<i>Breakdown of Tobacco Excise Revenue Sharing Funds by Province/Regency/City for 2026 Fiscal Year</i>
	11 Tahun 2026	PEMBERIAN PINJAMAN DAERAH DALAM RANGKA PELAKSANAAN KEBIJAKAN FISKAL NASIONAL YANG BERSUMBER DARI DANA LEMBAGA KEUANGAN BANK ATAU LEMBAGA KEUANGAN BUKAN BANK	<i>Provision of Regional Loans for the Implementation of National Fiscal Policy Sourced from Funds of Banks or Non-Bank Financial Institutions</i>
	10 Tahun 2026	PENGELOLAAN DANA BAGI HASIL PERKEBUNAN SAWIT	<i>Management of Revenue Sharing Funds from Oil Palm Plantations</i>
PERMEN ESDM	5 Tahun 2026	PEMBERIAN TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	<i>Provision of Performance Allowances for Employees within the Ministry of Energy and Mineral Resources</i>
PERMEN EKONOMI KREATIF/ KEPALA BADAN EKONOMI KREATIF	2 Tahun 2026	PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN EKONOMI KREATIF/BADAN EKONOMI KREATIF	<i>Organization of the Government Internal Control System within the Ministry of Creative Economy/Creative Economy Agency</i>
PERMEN DESA DAN PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL	2 Tahun 2026	PEDOMAN UMUM PENYALURAN BANTUAN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN DESA DAN PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL	<i>General Guidelines for the Distribution of Government Assistance within the Ministry of Villages and Development of Disadvantaged Regions</i>
	1 Tahun 2026	PAKAIAN DINAS DAN ATRIBUT PEGAWAI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN DESA DAN PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL	<i>Official Attire and Accessories for Employees within the Ministry of Villages and Development of Disadvantaged Regions</i>
KEPMEN KEPENDUDUKAN DAN PEMBANGUNAN KELUARGA/BKKBN	81/KEP/F1/2026	PETUNJUK TEKNIS PENINGKATAN KUALITAS PEMBINAAN PENGASUHAN 1000 (SERIBU) HARI PERTAMA KEHIDUPAN TAHUN 2026	<i>Technical Guidelines for Improving the Quality of Parenting Guidance During the First 1,000 (Thousand) Days of Life in 2026</i>

KEPMEN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA/KEPALA BP2MI	241/2026	KAMPANYE NASIONAL MIGRASI AMAN	<i>National Safe Migration Campaign</i>
KEPMEN PERDAGANGAN	422/2026	HARGA PATOKAN EKSPOR DAN HARGA REFERENSI ATAS PRODUK PERTAMBANGAN YANG DIKENAKAN BEA KELUAR	<i>Export Reference Prices and Reference Prices for Mining Products Subject to Export Duties</i>
KEPMEN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH	56/2026	PEDOMAN PENYELENGGARAAN TES KEMAMPUAN AKADEMIK DAN ASESMEN NASIONAL	<i>Guidelines for the Organization of Academic Ability Tests and National Assessments</i>
KEPMEN ESDM	124.K/MB.01/MEM.B/2026	HARGA MINERAL LOGAM ACUAN DAN HARGA BATUBARA ACUAN UNTUK PERIODE KEDUA BULAN MARET TAHUN 2026	<i>Reference Prices for Metal Minerals and Coal for the Second Period of March 2026</i>
KEPMEN PERINDUSTRIAN	469/2026	PROGRAM PENYUSUNAN PRIORITAS KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN TAHUN 2026	<i>Priority Setting Program of the Ministry of Industry for 2026</i>
SKB MENDAGRI, MENAG, MENDIKDASMAN, MENDIKTISAINTEK, MENKOMDIGI, MENTERI BKKBN, DAN MENTERI PPPA	400.1-492, 211, 2/KB/2026, 1/M/KB/2026, 117, 4/SKB/F1/2026, 2 Tahun 2026	PEDOMAN PEMANFAATAN DAN PEMBELAJARAN TEKNOLOGI DIGITAL DAN KECERDASAN ARTIFISIAL DI JALUR PENDIDIKAN FORMAL, NONFORMAL, DAN INFORMAL	<i>Guidelines for the Utilization and Learning of Digital Technology and Artificial Intelligence in Formal, Non-formal, and Informal Education</i>
SE MENTERI PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH	6 Tahun 2026	PELAKSANAAN RELAKSASI PEMBIAYAAN KOMPONEN HONOR GURU DAN TENAGA KEPENDIDIKAN NON APARATUR SIPIL NEGARA PADA DANA BANTUAN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN TAHUN ANGGARAN 2026	<i>Implementation of Funding Relaxation for Teacher Honoraria and Non-Civil Servant Educational Staff Components in the Educational Unit Operational Assistance Fund for 2026 Fiscal Year</i>
SE MENTERI DALAM NEGERI	000.2.3/1171/SJ	PENUNDAAN PERJALANAN KE LUAR NEGERI SELAMA LIBUR HARI RAYA IDULFITRI 1447 HIJRIAH	<i>Postponement of Overseas Travel During the Eid al-Fitr 1447 Hijri Holiday</i>
SE MENTERI INVESTASI DAN HILIRISASI/BKPM	6 Tahun 2025	KETENTUAN PERPANJANGAN KONFIRMASI KESESUAIAN KEGIATAN PEMANFAATAN RUANG DAN PERSETUJUAN KESESUAIAN KEGIATAN PEMANFAATAN RUANG YANG DITERBITKAN TANPA PENILAIAN BERDASARKAN PASAL 181 PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 5 TAHUN 2021 TENTANG PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO SECARA NON-ELEKTRONIK	<i>Provisions for the Extension of Confirmation of Compliance with Land Use Activities and Approval of Compliance with Land Use Activities Issued Without Assessment Pursuant to Article 181 of Regulation of the Government Number 5 of 2021 on the Organization of Non-Electronic Risk-Based Business Licensing</i>
PERATURAN DIRJEN PERBENDAHARAAN	PER-2/PB/2026	TATA CARA PEMBAGIAN ATAS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK PEMBAYARAN YANG BERASAL DARI DENDA TINDAK PIDANA PELANGGARAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN	<i>Procedures for the Distribution of Non-Tax State Revenues from Payments Derived from Fines for Traffic and Road Transport Violations</i>
KEPUTUSAN DIRJEN KEKAYAAN INTELEKTUAL	HKI-02.HH.05.06 Tahun 2026	DAFTAR INFORMASI PUBLIK DAN DAFTAR INFORMASI DIKECUALIKAN DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL TAHUN 2026	<i>List of Public Information and List of Excluded Information of the Directorate-General of Intellectual Property for 2026</i>
KEPUTUSAN DIRJEN PENGELOLAAN HUTAN LESTARI	13/2026	EVALUASI PEMBERIAN HAK AKSES SISTEM INFORMASI PENATAUSAHAAN HASIL HUTAN (SIPUHH) DAN SISTEM INFORMASI PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK (SIPNBP) PADA PEMEGANG HAK ATAS TANAH (PHAT)	<i>Evaluation of Access Rights to the Forest Product Management Information System (SIPUHH) and the Non-Tax State Revenue Information System (SIPNBP) for Land Rights Holders (PHAT)</i>
KEPUTUSAN DIRJEN BADAN PERADILAN UMUM	127/DJU/SK.HM1.1/III/2026	PEMBAHARUAN STANDARISASI WEBSITE PENGADILAN DI LINGKUNGAN PERADILAN UMUM	<i>Update on the Standardization of Court Websites within the General Judicial System</i>
SE DIRJEN PENANGGULANGAN PENYAKIT	HK.02.02/C/1077/2026	KEWASPADAAN DINI TERHADAP PENINGKATAN KASUS DAN KEJADIAN LUAR BIASA CAMPAK DI INDONESIA DAN GLOBAL	<i>Early Warning on the Increase in Measles Cases and Outbreaks in Indonesia and Globally</i>
SE DIRJEN BINA MARGA	07/SE/DB/2026	PENERAPAN DAN PENGGUNAAN SISTEM INFORMASI MANAJEMEN DATA LABORATORIUM BINA MARGA (MANDALA) DAN SISTEM INFOMASI SERTIFIKASI ASPHALT MIXING PLANT DAN BATCHING PLANT (INSIPLANT)	<i>Implementation and Use of the Bina Marga Laboratory Data Management (Manajemen Data Laboratorium Bina Marga/Mandala) Information System and the Asphalt Mixing Plant and Batching Plant Certification (Sertifikasi Asphalt Mixing Plant dan Batching Plant/Insiplant) Information System</i>
	01/SE/DB/2026	PETUNJUK TEKNIS SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA	<i>Technical Guidelines for the Electronic-Based Government System within the Directorate-General of Highways</i>
SE DIRJEN ADMINISTRASI HUKUM UMUM	AHU-AH.03-12 Tahun 2026	TATA CARA PELAPORAN PELAKSANAAN JABATAN PENERJEMAH TERSUMPAH DAN PENGENAAN SANKSI ADMINISTRATIF	<i>Procedures for Reporting on the Performance of Sworn Translators and the Imposition of Administrative Sanctions</i>
SURAT DIRJEN IMIGRASI	IMI-GR.01.01-133 Tahun 2026	PENANGANAN TERHADAP ORANG ASING YANG TERDAMPAK PEMBATALAN ATAU PENGALIHAN PENERBANGAN INTERNASIONAL AKIBAT SITUASI KEAMANAN DI KAWASAN TIMUR TENGAH	<i>Handling of Foreign Nationals Affected by the Cancellation or Diversion of International Flights Due to the Security Situation in the Middle East</i>
PERATURAN BADAN GIZI NASIONAL	1 Tahun 2026	SISA PANGAN, SAMPAH, DAN AIR LIMBAH DOMESTIK PROGRAM MAKAN BERGIZI GRATIS	<i>Food Waste, Garbage, and Domestic Wastewater from the Free Nutritious Meal Program</i>
PERATURAN BADAN PANGAN NASIONAL	2 Tahun 2026	PENYELENGGARAAN CADANGAN BERAS PEMERINTAH	<i>Organization of Government Rice Reserves</i>
PERATURAN BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA	3 Tahun 2026	TATA CARA PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DAN INSTRUMEN HUKUM LAINNYA DI LINGKUNGAN BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA	<i>Procedures for the Formulation of Laws and Regulations and Other Legal Instruments within the Meteorology, Climatology, and Geophysics Agency</i>
PERATURAN KEPALA OTORITA IBU KOTA NUSANTARA	4 Tahun 2026	PETA JALAN PENDIDIKAN IBU KOTA NUSANTARA TAHUN 2025-2045	<i>Roadmap for Education in the Capital City of Nusantara for 2025–2045</i>
	3 Tahun 2026	PENATAAN, PEMBANGUNAN, DAN PENGELOLAAN PASAR RAKYAT DI IBU KOTA NUSANTARA	<i>Planning, Development, and Management of Traditional Markets in the Capital City of Nusantara</i>
	2 Tahun 2026	PENETAPAN DAERAH MITRA IBU KOTA NUSANTARA	<i>Designation of Partner Regions for the Capital City of Nusantara</i>
PERATURAN KOMISI YUDISIAL	1 Tahun 2026	PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN KOMISI YUDISIAL NOMOR 2 TAHUN 2016 TENTANG SELEKSI CALON HAKIM AGUNG	<i>Second Amendment to Regulation of Judicial Commission Number 2 of 2016 on the Selection of Supreme Court Justice Candidates</i>
PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR BI	3 Tahun 2026	PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR NOMOR 17 TAHUN 2023 TENTANG PENYELENGGARAAN BANK INDONESIA-FAST PAYMENT	<i>Third Amendment to Regulation of Board of Governors Number 17 of 2023 on the Organization of Bank Indonesia-Fast Payment</i>
PERATURAN LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK TELEVISI	1 Tahun 2026	PERUBAHAN ATAS PERATURAN LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK TELEVISI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2024 TENTANG BESARAN VARIABEL DALAM FORMULA DAN TATA CARA PENGHITUNGAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK TELEVISI REPUBLIK INDONESIA	<i>Amendment to Regulation of the Public Broadcasting Institution of Television of the Republic of Indonesia Number 1 of 2024 on Variable Amounts in the Formula and Procedures for Calculating Tariffs on Types of Non-Tax State Revenues Applicable to the Public Broadcasting Institution of Television of the Republic of Indonesia</i>
PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN	1 Tahun 2026	PENGGUNAAN TENAGA KERJA ASING DAN PROGRAM ALIH PENGETAHUAN OLEH BANK UMUM	<i>Use of Foreign Workers and Knowledge Transfer Programs by Commercial Banks</i>

RANCANGAN PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN		PENERAPAN TATA KELOLA DAN MANAJEMEN RISIKO BAGI PENYELENGGARA PERDAGANGAN ASET KEUANGAN DIGITAL	<i>Application of Governance and Risk Management for Digital Financial Asset Trading Operators</i>
RANCANGAN PERATURAN ANGGOTA DEWAN KOMISIONER OJK		PENILAIAN TINGKAT KESEHATAN PERUSAHAAN PEMBIAYAAN DAN PERUSAHAAN PEMBIAYAAN SYARIAH	<i>Assessment of the Soundness Level of Financing Companies and Sharia Financing Companies</i>
KEPUTUSAN DIREKSI PT BURSA EFEK INDONESIA	Kep-00037/BEI/03-2026	PERUBAHAN TATA TERTIB PELELANGAN SAHAM PT BURSA EFEK INDONESIA	<i>Amendment to Rules of Procedure for the Stock Auction of PT Bursa Efek Indonesia</i>
SE BADAN GIZI NASIONAL	3 Tahun 2026	PELAYANAN PROGRAM MAKAN BERGIZI GRATIS (MBG) PADA BULAN RAMADHAN DAN IDUL FITRI 1447H/2026M, DAN LIBUR TAHUN BARU IMLEK 2026	<i>Implementation of the Free Nutritious Meal (Makan Bergizi Gratis/MBG) Program During the Month of Ramadan and Eid al-Fitr 1447H/2026M, and the 2026 Lunar New Year Holiday</i>
	2 Tahun 2026	PELAKSANAAN UNGGAH DOKUMENTASI FOTO MENU MAKAN BERGIZI GRATIS	<i>Uploading of Photographic Documentation of the Free Nutritious Meal Menu</i>
<b>PERIODE I BULAN MARET 2026 (FIRST PERIOD OF MARCH 2026)</b>			
RUU		HAK CIPTA	<i>Copyright</i>
RPP		USAHA PENYEDIAAN TENAGA LISTRIK	<i>Electricity Supply Business</i>
		PENGELOLAAN ASET DAN LIABILITAS PROGRAM PENSIUN BAGI PENGELOLA PROGRAM PENSIUN YANG TERKAIT KEUANGAN NEGARA	<i>Management of Pension Program Assets and Liabilities for Pension Program Managers Related to State Finances</i>
		TINDAKAN PENGAMANAN, TINDAKAN ANTIDUMPING, DAN TINDAKAN IMBALAN	<i>Safeguard Measures, Antidumping Measures, and Countervailing Measures</i>
PERPRES	6 Tahun 2026	PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 188 TAHUN 2024 TENTANG KEMENTERIAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH	<i>Amendment to Regulation of the President Number 188 of 2024 on the Ministry of Primary and Secondary Education</i>
RANCANGAN PERPRES		BADAN PELINDUNGAN DATA PRIBADI	<i>Personal Data Protection Agency</i>
PERMEN KEUANGAN	13/2026	PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PEMBAYARAN TUNJANGAN HARI RAYA DAN GAJI KETIGA BELAS TAHUN 2026 YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA	<i>Technical Guidelines for Implementing Holiday Allowances and the Thirteenth Salary Payment of 2026 Originating from the State Revenue and Expenditure Budget</i>
	9 Tahun 2026	PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 69 TAHUN 2025 TENTANG TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM BADAN PENGELOLA DANA PERKEBUNAN PADA KEMENTERIAN KEUANGAN	<i>Service Tariffs for the Public Service Agency of the Plantation Fund Management Agency at the Ministry Finance</i>
	8 Tahun 2026	PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 228/PMK.03/2017 TENTANG RINCIAN JENIS DATA DAN INFORMASI SERTA TATA CARA PENYAMPAIAN DATA DAN INFORMASI YANG BERKAITAN DENGAN PERPAJAKAN	<i>Amendment to Regulation of the Minister of Finance Number 228/PMK.03/2017 on Details of Data and Information Types and Procedures for Submitting Data and Information Related to Taxation</i>
PERMEN PERTANIAN	6 Tahun 2026	TATA CARA PERHITUNGAN NILAI KOMERSIAL DAN KOMPONEN BAHAN BAKU PUPUK BERSUBSIDI	<i>Procedures for Calculation of the Commercial Value and Components of Subsidized Fertilizer Raw Materials</i>
	5 Tahun 2026	PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI PERTANIAN NOMOR 38 TAHUN 2019 TENTANG PELEPASAN VARIETAS TANAMAN	<i>Second Amendment to Regulation of the Minister of Agriculture Number 38 of 2019 on the Release of Plant Varieties</i>
	4 Tahun 2026	PRODUKSI, SERTIFIKASI, DAN PENGAWASAN PEREDARAN BENIH HORTIKULTURA	<i>Production, Certification, and Supervision of Distribution of Horticultural Seeds</i>
	3 Tahun 2026	PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERTANIAN NOMOR 15 TAHUN 2025 TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN PRESIDEN NOMOR 6 TAHUN 2025 TENTANG TATA KELOLA PUPUK BERSUBSIDI	<i>Amendment to Regulation of the Minister of Agriculture Number 15 of 2025 on the Implementing Regulation of Regulation of the President Number 6 of 2025 on the Governance of Subsidized Fertilizers</i>
PERMEN KETENAGAKERJAAN	3 Tahun 2026	TATA NASKAH DINAS KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN	<i>Document Administration of the Ministry of Manpower Office</i>
PERMEN LINGKUNGAN HIDUP/ BADAN PENGENDALIAN LINGKUNGAN HIDUP	2 Tahun 2026	BAKU MUTU AIR LIMBAH DAN STANDAR TEKNOLOGI PENGOLAHAN AIR LIMBAH BAGI USAHA DAN/ATAU KEGIATAN PAKAN TERNAK DAN PAKAN AKUAKULTUR	<i>Wastewater Quality Standards and Wastewater Treatment Technology Standards for Animal Feed and Aquaculture Feed Businesses and/or Activities</i>
	1 Tahun 2026	SATU DATA BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	<i>Single Environmental Data</i>
PERMEN HUKUM	6 Tahun 2026	PERMOHONAN PATEN	<i>Patent Application</i>
	5 Tahun 2026	PENDAFTARAN MEREK	<i>Trade Registration</i>
PERMEN KOMUNIKASI DAN DIGITAL	8 Tahun 2026	TABEL ALOKASI SPEKTRUM FREKUENSI RADIO INDONESIA	<i>Indonesian Radio Frequency Spectrum Allocation Table</i>
PERMEN EKONOMI KREATIF/ KEPALA BADAN EKONOMI KREATIF	1 Tahun 2026	PENYAMPAIAN LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN EKONOMI KREATIF/BADAN EKONOMI KREATIF	<i>Submission of State Officials' Assets Reports within the Ministry of Creative Economy/Creative Economy Agency</i>
PERMEN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI	4 Tahun 2026	PENGELOLAAN TUGAS BELAJAR BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI	<i>Management of Study Assignments for Civil Servants within the Ministry of Higher Education, Science, and Technology</i>
	3 Tahun 2026	PENERIMAAN MAHASISWA BARU PROGRAM DIPLOMA DAN PROGRAM SARJANA PADA PERGURUAN TINGGI NEGERI	<i>New Student Admission for Diploma and Bachelor Programs at State Universities</i>
	2 Tahun 2026	PROGRAM INDONESIA PINTAR PENDIDIKAN TINGGI	<i>Smart Indonesia Higher Education Program</i>
PERMEN DALAM NEGERI	6 Tahun 2026	PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 109 TAHUN 2019 TENTANG FORMULIR DAN BUKU YANG DIGUNAKAN DALAM ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	<i>Amendment to Regulation of the Minister of Home Affairs Number 109 of 2019 on Forms and Books Used in Population Administration</i>
	2 Tahun 2026	PENGELOLAAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK DI KEMENTERIAN DALAM NEGERI, PEMERINTAH DAERAH, DAN PEMERINTAH DESA	<i>Management of Public Information Services in the Ministry of Home Affairs, Regional Governments, and Village Governments</i>
PERMEN AGRARIA DAN TATA RUANG/ KEPALA BPN	3 Tahun 2026	PENILAIAN TANAH	<i>Land Appraisal</i>
PERMEN AGAMA	4 Tahun 2026	PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI AGAMA NOMOR 19 TAHUN 2019 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA INSTANSI VERTIKAL KEMENTERIAN AGAMA	<i>Second Amendment to Regulation of the Minister of Religious Affairs Number 19 of 2019 on the Organization and Work Procedures of Vertical Agencies of the Ministry of Religious Affairs</i>
	3 Tahun 2026	STATUTA SEKOLAH TINGGI AGAMA KHONGHUCU INDONESIA NEGERI BANGKA BELITUNG	<i>Statute of the State Confucianism University of Indonesia, Bangka Belitung</i>
	2 Tahun 2026	STATUTA SEKOLAH TINGGI AGAMA KRISTEN NEGERI MESIAS SORONG	<i>Statutes of the State Christian University of Messiah, Sorong</i>

KEPMEN PERDAGANGAN	375/2026	HARGA PATOKAN EKSPOR DAN HARGA REFERENSI ATAS PRODUK PERTAMBANGAN YANG DIKENAKAN BEA KELUAR	<i>Export Benchmark Prices and Reference Prices for Mining Products Subject to Export Duty</i>
	374/2026	DAFTAR MEREK REFINED, BLEACHED, AND DEODORIZED PALM OLEIN DALAM KEMASAN BERMEREK DAN DIKEMAS DENGAN BERAT NETTO KURANG DARI ATAU SAMA DENGAN 25 KG	<i>List of Refined, Bleached, and Deodorized Palm Olein Brands in Branded Packaging and Packaged with A Net Weight of Less than or Equal to 25 KG</i>
	373/2026	HARGA PATOKAN EKSPOR DAN HARGA REFERENSI ATAS PRODUK PERTANIAN DAN KEHUTANAN YANG DIKENAKAN BEA KELUAR DAN TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM	<i>Export Benchmark Prices and Reference Prices for Agricultural and Forestry Products Subject to Export Duty and Public Service Agency Service Tariffs</i>
	334/2026	PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 2397 TAHUN 2025 TENTANG INSENTIF HAK EKSPOR ATAS PEMENUHAN KEBUTUHAN DALAM NEGERI (DOMESTIC MARKET OBLIGATION) MINYAK GORENG RAKYAT	<i>Amendment to Decree of the Minister of Trade Number 2397 of 2025 on Export Right Incentives to Meet Domestic Market Obligations for People's Cooking Oil</i>
KEPMEN KOMUNIKASI DAN DIGITAL	67/2026	STANDAR TEKNIS PERANGKAT TELEKOMUNIKASI LAND MOBILE RADIO	<i>Technical Standards for Land Mobile Radio Telecommunication Devices</i>
	43/2026	PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI KOMUNIKASI DAN DIGITAL NOMOR 13 TAHUN 2025 TENTANG PENETAPAN BALAI UJI LUAR NEGERI UNTUK KEPERLUAN SERTIFIKASI ALAT TELEKOMUNIKASI DAN/ATAU PERANGKAT TELEKOMUNIKASI	<i>Amendment to Decree of the Minister of Communication and Digital Affairs Number 13 of 2025 on the Determination of Foreign Testing Centers for Certification of Telecommunication Equipment and/or Telecommunication Devices</i>
KEPMEN PERHUBUNGAN	KM 51/2026	PERUBAHAN NAMA BANDAR UDARA KEDIRI DI KABUPATEN KEDIRI PROVINSI JAWA TIMUR MENJADI BANDAR UDARA DHOHO DI KABUPATEN KEDIRI PROVINSI JAWA TIMUR	<i>Change of the Name of Kediri Airport in Kediri Regency, East Java Province to Dhoho Airport in Kediri Regency, East Java Province</i>
	KM 12/2026	PEDOMAN FORMASI JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS KESELAMATAN PELAYARAN	<i>Guidelines for the Formation of Functional Positions of Shipping Safety Supervisor</i>
KEPMEN ESDM	102.K/MB.01/MEM.B/2026	HARGA MINERAL LOGAM ACUAN DAN HARGA BATUBARA ACUAN UNTUK PERIODE PERTAMA BULAN MARET TAHUN 2026	<i>Metal Mineral Reference Prices and Coal Reference Prices for the First Period, March 2026</i>
KEPMEN KEHUTANAN	170/2026	PEDOMAN TEKNIS PENGELOLAAN HIBAH, PINJAMAN, DAN PENDANAAN LAINNYA LINGKUP KEMENTERIAN KEHUTANAN	<i>Technical Guidelines for the Management of Grants, Loans, and Other Funding within the Ministry of Forestry</i>
KEPMEN IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN	M.IP-8.HK.03.01 Tahun 2026	PROGRAM PENYUSUNAN PERATURAN MENTERI IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN TAHUN 2026	<i>Program for the Formulation of Regulations of the Minister of Immigration and Corrections in 2026</i>
KEPMEN KELAUTAN DAN PERIKANAN	10 Tahun 2026	PETA JALAN PELAKSANAAN PENGARUSUTAMAAN GENDER DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN TAHUN 2025-2029	<i>Roadmap for Implementing Gender Mainstreaming in the Ministry of Marine Affairs and Fisheries 2025-2029</i>
KEPMEN LINGKUNGAN HIDUP/ KEPALA BADAN PENGENDALIAN LINGKUNGAN HIDUP	298/2026	DAFTAR INFORMASI PUBLIK LINGKUP KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP/BADAN PENGENDALIAN LINGKUNGAN HIDUP	<i>List of Public Information within the Ministry of Environment/Environmental Control Agency</i>
SURAT EDARAN MENTERI KETENAGAKERJAAN	M/4/HK.04.00/III/2026	PEMBERIAN BONUS HARI RAYA KEAGAMAAN TAHUN 2026 BAGI PENGEMUDI DAN KURIR PADA LAYANAN ANGKUTAN BERBASIS APLIKASI	<i>Provision of Religious Holiday Bonuses in 2026 for Drivers and Couriers in App-Based Transportation Services</i>
	M/3/HK.04.00/III/2026	PELAKSANAAN PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA KEAGAMAAN TAHUN 2026 BAGI PEKERJA/BURUH DI PERUSAHAAN	<i>Implementation of Religious Holiday Allowances in 2026 for Workers/Laborers in Companies</i>
SURAT EDARAN MENTERI INVESTASI DAN HILIRISASI/KEPALA BKPM	1.S/2026	KETENTUAN PENERBITAN KESESUAIAN KEGIATAN PEMANFAATAN RUANG DARAT BAGI USAHA MIKRO	<i>Provisions on the Issuance of Suitability of Land Space Utilization Activities for Micro-Scale Enterprises</i>
SURAT EDARAN MENTERI ATR/KEPALA BPN	B/LR.03.01/48/I/2026	PENGUATAN REFORMA AGRARIA	<i>Strengthening of Agrarian Reform</i>
KEPUTUSAN DIRJEN BADAN PERADILAN UMUM	1344/DJU/SK.HM1.1/III/2026	PERUBAHAN KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM NOMOR 1084/DJU/SK.HM.1.1/X/2024 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PERATURAN MAHKAMAH AGUNG RI NOMOR 1 TAHUN 2014 TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN LAYANAN HUKUM BAGI MASYARAKAT TIDAK MAMPU DI PENGADILAN PADA LINGKUNGAN PERADILAN UMUM	<i>Amendment to Decree of The Director-General of the General Court Number 1084/DJU/SK.HM.1.1/X/2024 on Technical Guidelines for Regulation of the Supreme Court of the Republic of Indonesia Number 1 of 2014 on Guidelines for Providing Legal Services to the Underprivileged Community in the Courts of the General Courts</i>
KEPUTUSAN DIRJEN PAJAK	KEP-37/PJ/2026	KEBIJAKAN PERPAJAKAN SEHUBUNGAN DENGAN IMPLEMENTASI SISTEM INTI ADMINISTRASI PERPAJAKAN DALAM RANGKA PENYAMPAIAN SURAT PEMBERITAHUAN MASA PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 MASA PAJAK DESEMBER 2025	<i>Tax Policy Relating to the Implementation of the Core Tax Administration System in the Framework of Submission of Periodic Returns of Article-21 Income Tax for the December 2025 Tax Period</i>
	KEP-19/PJ/2026	PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP-59/PJ/2023 TENTANG PENETAPAN BIAYA INVESTASI TANAMAN, RASIO BIAYA PRODUKSI, ANGKA KAPITALISASI, NILAI JUAL OBJEK PAJAK BUMI PER METER PERSEGI, HARGA UAP DAN HARGA LISTRIK, DAN LUAS AREAL PENANGKAPAN IKAN PER KAPAL, UNTUK PENETAPAN NILAI JUAL OBJEK PAJAK PAJAK BUMI DAN BANGUNAN	<i>Second Amendment to Decree of the Director-General of Tax Number Kep-59/PJ/2023 on the Determination of Plant Investment Costs, Production Cost Ratio, Capitalization Rates, Taxable Land Sales Value per Square Meter, Steam and Electricity Prices, and Fishing Area per Vessel, for Determining the Taxable Land and Building Tax</i>
KEPUTUSAN DIRJEN PERHUBUNGAN LAUT	KP-DJPL 107/2026	PETUNJUK PELAKSANAAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN OPERATOR SARANA BANTU NAVIGASI-PELAYARAN	<i>Instruction Guidelines for the Implementation of Education and Training for Shipping Navigation-Assistance Operators</i>
	KP-DJPL 106/2026	PENYELENGGARAAN ANGKUTAN LAUT UNTUK PROGRAM TIKET GRATIS SELAMA PENYELENGGARAAN ANGKUTAN LAUT LEBARAN TAHUN 2026 (1447 H)	<i>Organization of Sea Transportation for the Free Ticket Program during Implementation of Sea Transportation for Eid in 2026 (1447 H)</i>
SURAT EDARAN DIRJEN BINA KONSTRUKSI	47/SE/Dk/2026	TATA CARA PENYUSUNAN PERKIRAAN BIAYA PEKERJAAN KONSTRUKSI BIDANG PEKERJMN UMUM	<i>Procedures for Preparing Cost Estimates for Construction Works in the Public Works Sector</i>
SURAT EDARAN BERSAMA DIRJEN BINA KONSTRUKSI DAN KETUA BADAN NASIONAL SERTIFIKASI PROFESI	19/SE/DK/2026; SE.001/BNSP/I/2026	PEDOMAN PEMANTAUAN, EVALUASI, DAN PENILAIAN KINERJA LEMBAGA SERTIFIKASI PROFESI OLEH KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN BADAN NASIONAL SERTIFIKASI PROFESI	<i>Guidelines for Monitoring, Evaluation, and Performance Assessment of Professional Certification Institutions by the Ministry of Public Works and the National Professional Certification Agency</i>
PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN	2 Tahun 2026	REKSA DANA BERBENTUK KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF YANG UNIT PENYERTAANNYA DIPERDAGANGKAN DI BURSA EFEK DENGAN ASET YANG MENDASARI BERUPA EMAS	<i>Mutual Funds in the Form of Collective Investment Contracts with Participation Units Traded on the Stock Exchange with Gold as the Underlying Assets</i>
PERATURAN KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI	2 Tahun 2026	PERUBAHAN ATAS PERATURAN KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2022 TENTANG KEPEGAWAIAN KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI	<i>Amendment to Regulation of the Corruption Eradication Commission of the Republic of Indonesia Number 1 of 2022 on Corruption Eradication Commission Personnel</i>

PERATURAN KEPALA BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA	2 Tahun 2026	PEDOMAN PENETAPAN NAMA BANGUNAN GEDUNG, RUANGAN DAN PRASARANA DI LINGKUNGAN BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA	<i>Guidelines for Determining the Names of Buildings, Rooms, and Infrastructure in the Meteorology, Climatology, and Geophysics Agency</i>
PERATURAN BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA	2 Tahun 2026	PEDOMAN SUPERVISI PELAKSANAAN MODIFIKASI CUACA	<i>Guidelines for Supervision of Weather Modification Implementation</i>
	1 Tahun 2026	TATA CARA PEROLEHAN TANDA DAFTAR PELAKSANA MODIFIKASI CUACA	<i>Procedures for Obtaining a Weather Modification Implementation Certificate</i>
PERATURAN BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN	4 Tahun 2026	PELAKSANAAN FARMAKOVIGILANS	<i>Implementation of Pharmacovigilance</i>
	3 Tahun 2026	PERUBAHAN ATAS PERATURAN BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN NOMOR 13 TAHUN 2019 TENTANG BATAS MAKSIMAL CEMARAN MIKROBA DALAM PANGAN OLAHAN	<i>Amendment to Regulation of the National Agency of Drug and Food Control Number 13 of 2019 on Maximum Limits of Microbial Contamination on Processed Food</i>
PERATURAN BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI	5 Tahun 2026	PERUBAHAN KESEMBILANBELAS ATAS PERATURAN BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI NOMOR 13 TAHUN 2024 TENTANG PENGATURAN PROGRAM STUDI YANG TERCAKUP DALAM LEMBAGA AKREDITASI MANDIRI	<i>Nineteenth Amendment to Regulation of the National Accreditation Board for Higher Education Number 13 of 2024 on the Regulation of Study Programs Covered by the Independent Accreditation Board</i>
	4 Tahun 2026	ORGANISASI DAN TATA KELOLA BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI	<i>Organization and Governance of the National Accreditation Board for Higher Education</i>
	3 Tahun 2026	KEBIJAKAN AKREDITASI PERGURUAN TINGGI SELAMA MASA TRANSISI	<i>University Accreditation Policy during the Transition Period</i>
	2 Tahun 2026	PERUBAHAN KEDELAPANBELAS ATAS PERATURAN BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI NOMOR 13 TAHUN 2024 TENTANG PENGATURAN PROGRAM STUDI YANG TERCAKUP DALAM LEMBAGA AKREDITASI MANDIRI	<i>Eighteenth Amendment to Regulation of the National Accreditation Board for Higher Education Number 13 of 2024 on the Regulation of Study Programs Covered by the Independent Accreditation Board</i>
	1 Tahun 2026	PERUBAHAN KETUJUHBELAS ATAS PERATURAN BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI NOMOR 13 TAHUN 2024 TENTANG PENGATURAN PROGRAM STUDI YANG TERCAKUP DALAM LEMBAGA AKREDITASI MANDIRI	<i>Seventeenth Amendment to Regulation of the National Accreditation Board for Higher Education Number 13 of 2024 on the Regulation of Study Programs Covered by the Independent Accreditation Board</i>
RANCANGAN PERATURAN BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR		PENYELENGGARAAN PERIZINAN KETENAGANUKLIRAN UNTUK NONPELAKU USAHA	<i>Nuclear Power Licensing Implementation for Non-Business Actors</i>
RANCANGAN PERATURAN ANGGOTA DEWAN KOMISIONER OJK		PENILAIAN KEMAMPUAN DAN KEPATUTAN BAGI PIHAK UTAMA LEMBAGA PEMBIAYAAN, PERUSAHAAN MODAL VENTURA, LEMBAGA KEUANGAN MIKRO, DAN LEMBAGA JASA KEUANGAN LAINNYA	<i>Fit and Proper Test for Primary Parties of Financing Institutions, Venture Capital Firms, Microfinance Institutions, and Other Financial Service Institutions</i>
KEPUTUSAN DIREKSI PT BURSA EFEK INDONESIA	Kep-00030/BEI/02-2026	KEBIJAKAN BIAYA DAN INSENTIF BAGI LIQUIDITY PROVIDER SAHAM	<i>Fees and Incentive Policies for Liquidity Provider Stock</i>
	Kep-00029/BEI/02-2026	KETENTUAN PARAMETER EFEK LIQUIDITY PROVIDER SAHAM SERTA EFEK INSENTIF LIQUIDITY PROVIDER SAHAM DAN KEWAJIBAN KUOTASI LIQUIDITY PROVIDER SAHAM	<i>Provisions on the Effective Parameters of Liquidity Provider Stock, as well as the Effective Incentives of Liquidity Provider Stock and Quotation Obligations of Liquidity Provider Stock</i>
SURAT EDARAN KOMISI PENYIARAN INDONESIA PUSAT	1 Tahun 2026	PEMANFAATAN KECERDASAN ARTIFISIAL DALAM PROGRAM SIARAN PADA LEMBAGA PENYIARAN	<i>Use of Artificial Intelligence in Broadcasting Programs at Broadcasting Institutions</i>
SURAT EDARAN BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN	2 Tahun 2026	KETENTUAN PRODUKSI, IMPORTASI, REGISTRASI, DAN PEREDARAN BAHAN TAMBAHAN PANGAN DINITROGEN MONOKSIDA (N2O)	<i>Provisions on the Production, Importation, Registration, and Distribution of the Food Additive Dinitrogen Monoxide (N2O)</i>
SURAT EDARAN KEPALA BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR	375/2026	PELAYANAN PERIZINAN KETENAGANUKLIRAN UNTUK NONPELAKU USAHA	<i>Nuclear Power Licensing Services for Non-Business Actors</i>
SURAT EDARAN BADAN PENYELENGGARA JAMINAN PRODUK HALAL	2 Tahun 2026	MEKANISME PENENTUAN KATEGORI PRODUK DALAM REGISTRASI SERTIFIKAT HALAL LUAR NEGERI UNTUK PRODUK YANG BELUM TERCANTUM DALAM KETENTUAN JENIS PRODUK YANG WAJIB BERSERTIFIKAT HALAL DAN BAHAN YANG DIKECUALIKAN DARI KEWAJIBAN BERSERTIFIKAT HALAL	<i>Mechanism for Determining Product Categories in Registration of Foreign Halal Certificates for Products Not Listed in the Provisions on Product Types Required to be Halal Certified and Materials Exempted from the Obligation to be Halal Certified</i>
SURAT EDARAN DIREKTUR TEKNIK DAN LINGKUNGAN/ KEPALA INSPEKTUR TAMBANG	B-930/MB.07/DBT.KP/2026	PEMBELAJARAN KASUS KECELAKAAN TAMBANG SEMESTER II TAHUN 2025 DALAM RANGKA PENINGKATAN KEWASPADAAN DALAM UPAYA PENINGKATAN KINERJA KESELAMATAN PERTAMBANGAN	<i>Case Study of Mining Accidents in Semester II of 2025 in the Framework of Increasing Vigilance in Efforts to Improve Mining Safety Performance</i>
	2.E/MB.07/DBT.KP/2026	EDARAN TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN BULAN K3 NASIONAL PERTAMBANGAN TAHUN 2026	<i>Circular on Implementation Instructions for the K3 Month for National Mining in 2026</i>